

THE ANALYSIS OF GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IMPACT ON PEOPLE WELFARE LEVEL IN PEKANBARU CITY

Helly Aroza Siregar
Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia
Email: hellyaroza@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the government of Pekanbaru and to know the impact of the government financial performance as measured by efficiency, effectiveness and economy of government financial report and fiscal decentralization on people's welfare as measured by the level of health and the Human Development Index in Pekanbaru City in the period 2011 to 2020. The research method is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results of the study show that the efficiency, effectiveness and economics of local government financial report have no effect on people's welfare, both on the level of health and the Human Development Index. Meanwhile, Fiscal Decentralization has a significant effect on the level of health and the Human Development Index.

Keywords: *People welfare; Financial efficiency; Financial effectiveness; Financial economy; Fiscal Decentralization*

ANALISIS DAMPAK KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dan melihat dampak dari kinerja keuangan pemerintah tersebut yang diukur dengan efisiensi, efektivitas dan ekonomi keuangan serta desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2020. Metode penelitian adalah dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi, efektivitas dan ekonomi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik terhadap tingkat kesehatan maupun Indeks Pembangunan Manusia. Sementara Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia

Kata kunci: *Kesejahteraan masyarakat; Efisiensi keuangan; Efektivitas keuangan; Ekonomi keuangan; Desentralisasi fiskal*

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari penyelenggaraan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal ini maka pemerintahan Negara Republik Indonesia diselenggarakan, dan pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah tersebut menggunakan anggaran negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu elemen penyelenggara untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah Pemerintah Daerah.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai faktor. Beberapa diantaranya dapat diukur dengan tingkat kesehatan dan indeks pembangunan manusia yang baik. Menurut (BPS, 2021) terdapat berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur, dua diantaranya adalah bidang kesehatan dan indeks pembangunan manusia. Kedua aspek tersebut tentunya ikut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang mengalami kemunduran akibat pandemic Covid-19. Dari aspek kesehatan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru, misalnya adalah Angka Kesakitan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sebesar 22,05 persen, angka ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021. Angka ini melonjak naik sebesar 8,28 persen jika dibandingkan dengan Angka Kesakitan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2020 (BPS Kota Pekanbaru, 2022). Selain dari masalah tersebut, masalah kesehatan lainnya yang masih menjadi fenomena di Kota Pekanbaru adalah masalah stunting. Pada tahun 2022 jumlah balita yang menderita stunting adalah sebanyak 303 kasus (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2023). Meninjau berbagai masalah kesehatan tersebut maka, perlu adanya kinerja yang baik dalam mengatasinya.

Dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (2), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pelaksanaan APBD. Hasil pertanggungjawaban tersebut dapat diukur dalam dua kategori pengukuran kinerja yaitu secara finansial dan non finansial.

Pengukuran kinerja pelaksanaan keuangan daerah secara finansial merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk menilai apakah penggunaan anggaran oleh pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut peraturan ini Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Menurut peraturan tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban setiap kepala daerah. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam mewujudkan *good government governance* atau tata kelola pemerintah yang baik. Tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good government governance* tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Siregar, 2018).

Hasil penelitian dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kinerja yang beragam dari Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dianggap sangat tinggi (Susilawati et al., 2018). Penelitian lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berada dalam kategori kurang efisien dan tidak efisien (Fitriani & Dwirandra, 2014). Rasio efektifitas keuangan daerah di Kota Palopo berada dalam kategori belum efektif (Toselong et al., 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh (Erwina & Badrudin, 2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial (Beauty, 2016).

Disisi lain, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah seperti derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Riau (Azwandi et al., 2022). Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Papua menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah khususnya rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap IPM (Indramawan, 2018).

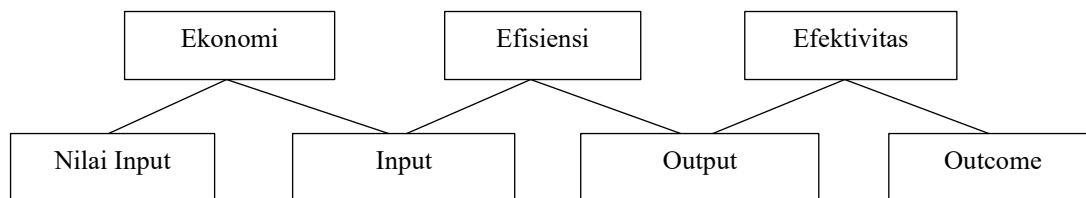
Secara pengungkapan rasio kinerja dari beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang berada dalam kategori yang belum baik. Dilain sisi, penatausahaan keuangan yang baik sehingga menghasilkan kinerja yang diharapkan sudah seharusnya memberikan dampak kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang mana menggunakan anggaran keuangan daerah, pada dasarnya adalah dalam rangka memenuhi hak rakyat untuk memperoleh layanan publik dan pemenuhan kesejahteraan. Berdasarkan asumsi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja keuangan sangat berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang telah direalisasikan. Menurut (Nirwana et al., 2014) Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut (Halim, 2002), beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya adalah rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika kinerja organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009). Konsep ini merupakan pengukuran kinerja berbasis Value For Money (VFM). *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya (KPBU, 2022). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dengan konsep value for money dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Value For Money

(Sumber: (Mardiasmo, 2009)

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009). Ekonomis merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah (G. Y. N. Sari et al., 2022). Nilai input dalam rasio ekonomi adalah Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan segala pengeluaran negara untuk kepentingan aparatur negara yang tidak berkaitan secara langsung dengan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Idealnya, pengeluaran untuk aparatur negara yang semakin kecil menunjukkan bahwa aparatur negara dapat menghindari pengeluaran yang tidak penting atau tidak produktif bagi kepentingan publik.

Efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan perolehan penerimaan daerah dengan mengelola sumber keuangan daerah yang seminimal mungkin. Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Adapun pendapatan yang diterima oleh daerah merupakan output dari besarnya input yang telah dikeluarkan untuk memperoleh output tersebut. Input dalam hal ini adalah besarnya Belanja Daerah, sementara output adalah Pendapatan Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seluruh pengeluaran tersebut didayagunakan untuk memperoleh Pendapatan Daerah yang merupakan sumber dana dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan

Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Berliani, 2016). Menurut (Mardiasmo, 2009) efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan, sementara outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu (Mardiasmo, 2009).

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi (Litvack & Seddon, 2002). Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Sementara Litvack dan Seddon (1992: 2) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (fungsi publik) dari pemerintah kepada daerah bawahan) atau organisasi semi-mandiri instansi vertikal) atau kepada pihak swasta (Elsye, 2013). Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya (Khusaini, 2006). Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014)

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Sunarti, 2012) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata (Febrianti, 2021). Berdasarkan hal ini, beberapa indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah kualitas kesehatan dan pendidikan.

Kualitas kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup (Sugiantari & Budiantara, 2013; Suryaningsih et al., 2015). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018). Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia adalah yang menjadi tujuan utama. Karena dasar dari pembangunan adalah pembangunan manusia, maka perlu diutamakan alokasi belanja yang berhubungan dengan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran pemerintah (Prakoso, 2017).

Menurut (F. N. G. Sari & Riharjo, 2020), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat dan penduduk serta menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dalam kualitas harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut pandangan The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan (Baeti et al., 2013).

Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil dari penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Erwina & Badrudin, 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial (Beauty, 2016).

Menurut (Faud, 2016), analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah diantaranya adalah rasio efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan desentralisasi fiskal.

Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Rasio efisiensi keuangan yang meminimalisir pengeluaran dalam upaya melakukan penghematan untuk memperoleh pendapatan menunjukkan efisiensi keuangan daerah yang baik atau efisien. Dengan efisiensi pengeluaran, maka pendapatan daerah akan dapat lebih maksimal digunakan untuk program-program atau kegiatan

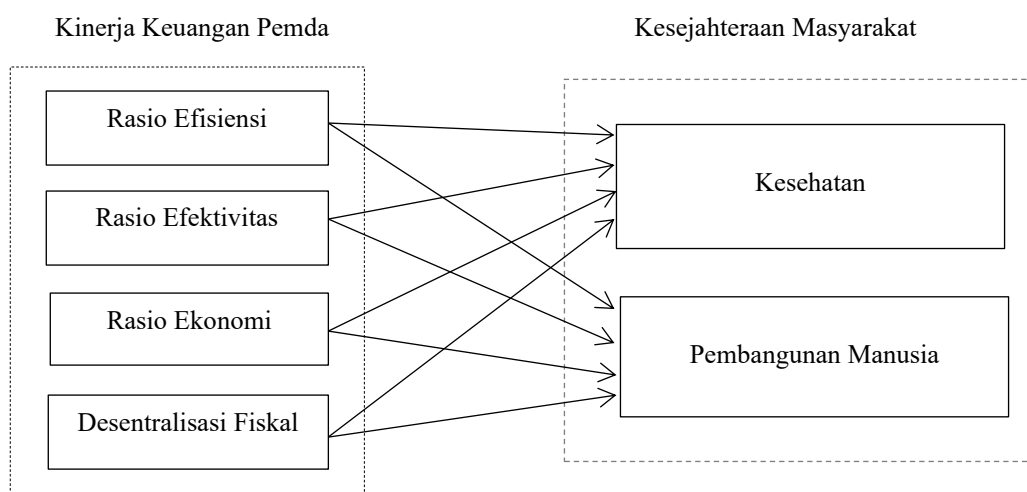
yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Khairudin et al., 2019).

Efektifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas keuangan suatu daerah menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ardilla & Putri, 2015; Fathah, 2017; Harahap & Nasution, 2019). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Majalengka (Berliani, 2016). Hal ini diperkuat dengan penelitian dari (Suryaningsih et al., 2015) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah, yang diukur dengan efektivitas keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya semakin meningkatnya kinerja keuangan daerah yang membaik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati – hati / cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu (Ulum, 2009). Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek ekonomis dalam penggunaan anggaran berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintah daerah dapat meminimalkan sumber pemasukan yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Rasio ekonomi diukur dengan membandingkan input dan nilai input. Nilai input adalah Belanja Daerah karena nilai input yang akan digunakan untuk menjalankan anggaran secara keseluruhan berasal dari dana Belanja Daerah. Sementara *input*-nya adalah Belanja Pegawai. Belanja Pegawai menjadi *input* karena untuk melaksanakan seluruh mekanisme anggaran maka diperlukan pegawai untuk melaksanakannya, dengan demikian maka pegawai pemerintah daerah diberikan gaji sebagai balas jasa atas pekerjaannya yaitu dalam bentuk Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk melaksanakan Belanja Daerah maka dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah semakin ekonomis.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Penyaluran anggaran dari pusat kepada pemerintah daerah akan menjadi suatu dukungan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan di daerah, dimana kegiatan pemerintah daerah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pelayanan publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Saputra & Mahmudi, 2012).

Berdasarkan paparan di atas maka diduga bahwa kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio efisiensi, efektifitas, ekonomi dan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan (rasio Angka Harapan Hidup) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Diduga kinerja efisiensi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru
- H₂ : Diduga kinerja efektivitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru
- H₃ : Diduga kinerja ekonomi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru
- H₄ : Diduga kinerja desentralisasi fiskal pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru
- H₅ : Diduga kinerja efisiensi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru
- H₆ : Diduga kinerja efektivitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru
- H₇ : Diduga kinerja ekonomi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru
- H₈ : Diduga kinerja desentralisasi fiskal pemerintah daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Data sekunder meliputi data rasio keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diolah dari data Laporan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Sementara data kesejahteraan masyarakat merupakan kesehatan masyarakat diperoleh dari data Angka Harapan Hidup dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru periode 2011-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara variabel independen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi, efektivitas, ekonomi keuangan, dan desentralisasi fiskal. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diukur dengan indikator umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (Badan Pusat Statistik RI, 2023). Untuk menentukan kategori IPM di dasarkan pada konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penelitian (Yektiningsih, 2018) dan (Siswati & Hermawati, 2018). Konsep IPM tersebut menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut : Sangat Tinggi : IPM > 80; Tinggi : IPM antara 70 < IPM < 80; Sedang : IPM antara 60 < IPM < 70; Rendah : IPM < 60

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Berdasarkan hal ini maka rumus efisiensi keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Berliani, 2016). Berdasarkan hal ini maka rumus efektivitas keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Keuangan} = \frac{\text{Anggaran PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio ekonomi diukur dengan membandingkan input dan nilai input (Mardiasmo, 2009). Nilai input adalah Belanja Daerah karena nilai input yang akan digunakan untuk menjalankan anggaran secara keseluruhan berasal dari dana Belanja Daerah. Sementara *input*-nya adalah Belanja Pegawai. Berdasarkan hal ini maka rumus ekonomi keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi Keuangan} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Dampak Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru (Helly Aroza Siregar)

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi (Litvack & Seddon, 2002). Berdasarkan hal ini maka, rasio desentralisasi fiskal sudah seharusnya menunjukkan perbandingan antara sumber pendapatan asli daerah yaitu PAD dengan seluruh sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk total Pendapatan Daerah. Dengan demikian rumus rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah (PD)}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu kinerja keuangan pemerintah yang terdiri dari rasio efisiensi, efektivitas, ekonomi dan desentralisasi fiskal, terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan (rasio Angka Harapan Hidup) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan analisis regresi linear berganda.

Adapun rumus untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

- Y_1 : Angka Harapan Hidup (AHH)
- Y_2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi
- X_1 : Efisiensi Keuangan
- X_2 : Efektivitas Keuangan
- X_3 : Ekonomi Keuangan
- X_4 : Desentralisasi Fiskal
- E : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah statistik deskriptif data penelitian:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Efisiensi keuangan	80,89	102,93	93,75
Efektivitas keuangan	38,77	123,15	74,97
Ekonomi keuangan	35,94	59,02	47,22
Desentralisasi fiskal	14,53	64,24	26,47
Kesehatan	71,46	72,34	71,77
IPM	77,71	81,35	79,46

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

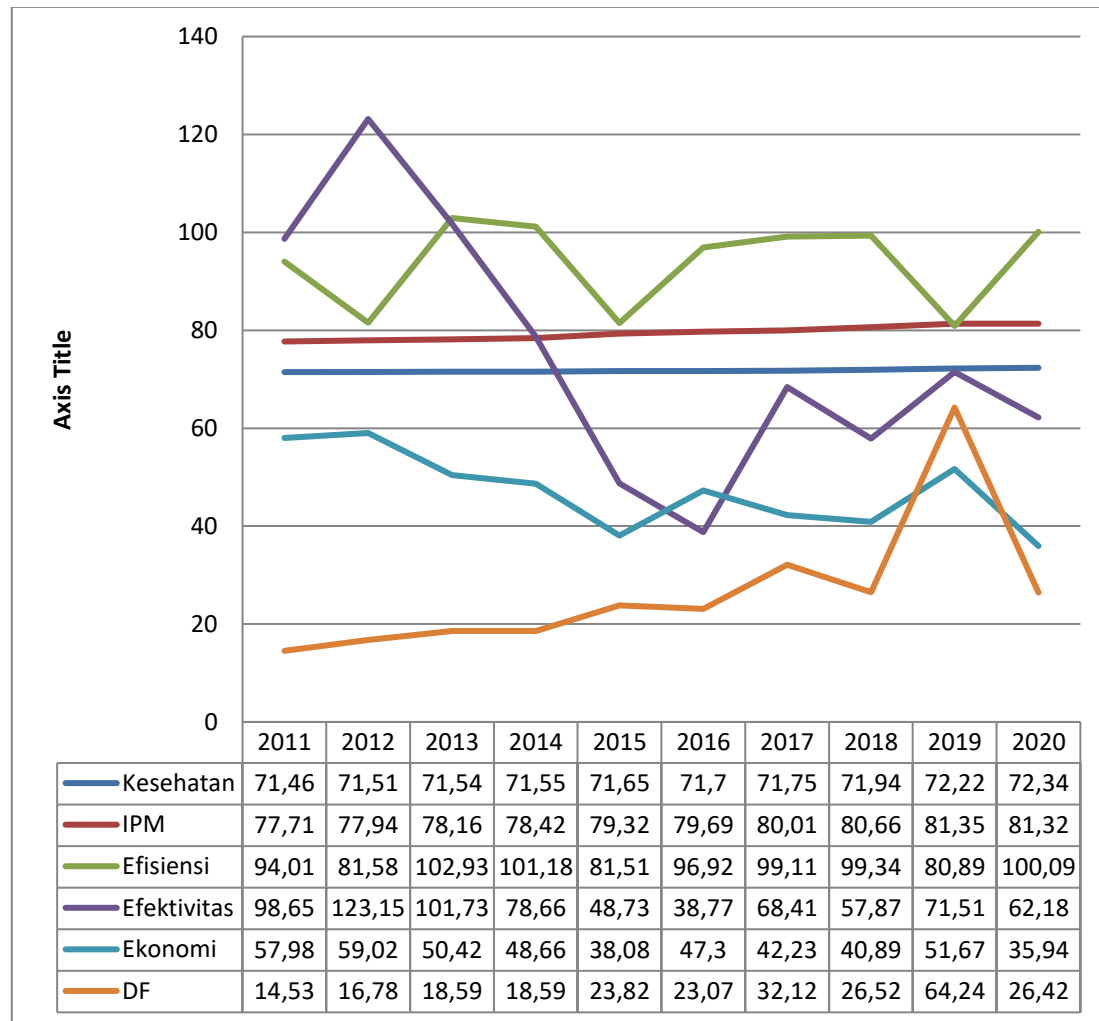
Gambaran terkait statistik deskriptif data penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.

Dalam satu dekade terakhir, secara rata-rata kinerja keuangan pemerintah berada dalam kriteria “kurang efisien”. Tingkat belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah jika dibandingkan dengan pendapatan daerah adalah 93,75%. Tingkat efisiensi tertinggi adalah 80,89% dengan kriteria “cukup efisien”, sementara kinerja keuangan pernah berada dalam kategori “tidak efisien” dengan persentase 102,92%.

Kinerja efektivitas keuangan pemerintah menunjukkan grafik yang fluktuatif. Terjadi penurunan kinerja sejak tahun 2013 sampai dengan 2016, dimana dalam empat tahun tersebut kinerja pemerintah berada dalam kategori tidak efektif. Efektivitas keuangan secara rata-rata 74,97%. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target PAD di daerah dalam kategori yang kurang efektif. Kinerja keuangan pemerintah terendah berada dalam kategori “tidak efektif” dengan persentase 38,77% pada tahun 2016, namun pernah berada dalam kategori “sangat efektif” pada tahun 2012 dengan persentase 123,15%

Kinerja ekonomi keuangan pemerintah pada umumnya mengalami penurunan, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2019, namun kembali menurun pada tahun 2017 dan

2018, serta tahun 2020. Secara rata-rata kinerja ekonomi keuangan berada pada angka 47,22% yaitu dalam kategori “sangat ekonomis”.



Gambar 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rerata Desentralisasi fiskal berada pada angka 26,47% dengan kategori sedang. Artinya besarnya Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan seluruh Pendapatan Daerah adalah 26,47%. Derajat desentralisasi fiskal pernah berada pada angka 14,53% dengan kriteria “kurang”, dan kinerja desentralisasi fiskal terbaik terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 64,24% dengan kategori “sangat baik”.

Tingkat kesehatan masyarakat kota Pekanbaru dalam satu dekade terakhir secara rerata berada pada angka 71,77. Angka ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup masyarakat di kota Pekanbaru adalah 71 tahun lebih. Semakin panjang hidup seseorang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan orang tersebut sangat baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat kota Pekanbaru secara rerata dalam satu dekade terakhir adalah 79,46. Angka ini termasuk dalam kategori IPM yang tinggi. IPM yang tinggi dapat menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dengan baik, kesempatan memperoleh pendapatan terbuka bagi seluruh penduduk dan tersedianya akses yang baik dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Hasil Uji Regresi

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik dan data dinyatakan normal dan memenuhi syarat dalam asumsi klasik, yaitu tidak terjadi multikolinearitas dan heterokedastisitas, maka dilakukan uji regresi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	75.176	2.578		29.157	.000
Efisiensi keuangan	.005	.009	.144	.563	.598
Efektivitas keuangan	.003	.004	.263	.730	.498
Ekonomi keuangan	-2.718	1.497	-.638	-1.816	.129
Desentralisasi fiskal	.016	.006	.761	2.906	.034

a. Dependent Variable: Kesehatan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi persamaan 1 dalam Tabel 7, maka dapat ditulis persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = 75,176 + 0,005 X_1 + 0,003 X_2 - 2,718 X_3 + 0,016 X_4$$

Adapun koefisien determinasi pada regresi persamaan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Koefisien Determinasi Regresi Persamaan 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.752	.554	.20402

a. Predictors: (Constant), Desentralisasi fiskal, Ekonomi keuangan, Efisiensi keuangan, Efektivitas keuangan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,554 yang menunjukkan bahwa 55,4% dari tingkat kesehatan di Kota Pekanbaru dapat diprediksi dengan variabel kinerja keuangan yang terdiri dari efisiensi keuangan, efektifitas keuangan, ekonomi keuangan dan desentralisasi fiskal, sedangkan 44,6% merupakan sumbangsih dari faktor lain di luar model persamaan 1 pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Regresi Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	92.457	8.050		11.486	.000
Efisiensi keuangan	.019	.027	.126	.712	.508
Efektivitas keuangan	-.003	.013	-.049	-.195	.853
Ekonomi keuangan	-9.855	4.674	-.515	-2.109	.089
Desentralisasi fiskal	.068	.017	.710	3.904	.011

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi persamaan 2 dalam Tabel 2, maka dapat ditulis persamaan sebagai berikut:

$$Y_2 = 92,457 + 0,019 X_1 - 0,003 X_2 - 9,855 X_3 + 0,068 X_4$$

Adapun koefisien determinasi pada regresi persamaan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Koefisien Determinasi Regresi Persamaan 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 ^a	.881	.785	.63695

a. Predictors: (Constant), Desentralisasi fiskal, Ekonomi keuangan, Efisiensi keuangan, Efektivitas keuangan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,785 yang menunjukkan bahwa 78,5% dari Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dapat diprediksi dengan variabel kinerja keuangan yang terdiri dari efisiensi keuangan, efektifitas keuangan, ekonomi keuangan dan desentralisasi fiskal, sedangkan 11,5% merupakan sumbangsih dari faktor lain di luar model persamaan 2 pada penelitian ini.

Hasil uji regresi untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap kesehatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel Dependen	Variabel Independen	t tabel	t hitung	Signifikansi	Keputusan
Kesehatan	Efisiensi Keuangan	2,571	0,563	0,598	Tidak Perpengaruh
	Efektivitas Keuangan	2,571	0,730	0,498	Tidak Perpengaruh
	Ekonomi Keuangan	2,571	-1,816	0,129	Tidak Perpengaruh
	Desentralisasi Fiskal	2,571	2,906	0,034	Berpengaruh Signifikan
IPM	Efisiensi Keuangan	2,571	.712	.508	Tidak Perpengaruh
	Efektivitas Keuangan	2,571	-.195	.853	Tidak Perpengaruh
	Ekonomi Keuangan	2,571	-2.109	.089	Tidak Perpengaruh
	Desentralisasi Fiskal	2,571	3.904	.011	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pembahasan

Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil dari penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan perolehan penerimaan daerah dengan mengelola sumber keuangan daerah yang seminimal mungkin. Rasio efisiensi keuangan yang meminimalisir pengeluaran dalam upaya melakukan penghematan untuk memperoleh pendapatan menunjukkan efisiensi keuangan daerah yang baik atau efisien. Dengan efisiensi pengeluaran, maka pendapatan daerah akan dapat lebih maksimal digunakan untuk program-program atau kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, secara rata-rata kinerja keuangan pemerintah berada dalam kriteria “kurang efisien”. Sementara kinerja efisiensi keuangan pemerintah tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan dan IPM. Kinerja efisiensi keuangan pemerintah berfluktuatif dari tahun ke tahun sementara tingkat kesehatan dan IPM meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang efisien dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk belanja daerah. Sementara efisiensi keuangan daerah ini tidak memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan dan IPM di Kota Pekanbaru dalam periode 2011 sampai dengan 2020 dalam kategori yang baik. Artinya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan penyelenggaraan keuangan daerah sudah seharusnya digunakan dengan efisien untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Khairudin et al., 2019).

Efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas keuangan suatu daerah menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam periode 2011 sampai dengan 2020 dalam kategori “kurang efektif”. Ini menunjukkan bahwa pencapaian target Pendapatan Asli Daerah masih belum maksimal, sementara peningkatan PAD merupakan suatu syarat kemandirian daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Berliani, 2016; Suryaningsih et al., 2015) yang membuktikan bahwa efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Aspek ekonomi dalam penggunaan anggaran berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintah daerah dapat meminimalkan sumber pemasukan yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kategori yang “sangat ekonomis”. Hal ini karena besarnya Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan keseluruhan Belanja Daerah masih dibawah angka 60%. Penetapan angka 60% dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan perlu ditinjau ulang, karena persentase penggunaan Anggaran Daerah sudah seharusnya dipergunakan lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun dalam kategori sangat ekonomis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan dan IPM. Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan

anggaran dari tingkat pemerintahan pusat kepada pemerintahan di daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Penyaluran anggaran dari pusat kepada pemerintah daerah akan menjadi suatu dukungan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan di daerah, dimana kegiatan pemerintah daerah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pelayanan publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Saputra & Mahmudi, 2012).

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, pertama kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam periode 2011-2020 yang terdiri dari kinerja efisiensi keuangan secara rerata berada dalam kategori “kurang efisien”, kinerja efektivitas berada dalam kategori “kurang efektif” dan kinerja ekonomi keuangan secara rerata dalam kategori “sangat ekonomis”, sementara kinerja efisiensi, efektivitas dan ekonomi keuangan ini tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan maupun IPM. Kedua, kinerja keuangan yang diukur dengan Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan maupun IPM.

Berikut ini adalah beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pertama, diharapkan agar pemerintah daerah lebih baik dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Kedua, agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran dengan efisien dan efektif sehingga amanah masyarakat untuk menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85.
- Azwandi, Wibisono, C., Indrawan, M. G., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in the Province of Riau Island. *International Journal of Educational Review*, 5(2), 633–650.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2018). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik RI. (2023). *Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia?* BPS. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Baeti, N., Jurusan, *, Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Juli, D. (2013). PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011 Info Artikel. *Edaj: Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98.
- Beauty, F. N. (2016). THE ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE FOR EDUCATION AND HEALTH SECTOR ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN INDONESIA YEAR 2008-2013 JURNAL Created By : Farlinda Nur Beauty INTERNATIONAL PROGRAM IN ECONOMICS ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2), 121–144.
- BPS. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS Kota Pekanbaru. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2021*.
- Elsye, R. (2013). *Desentralisasi Fiskal*. Alqaprint Jatinangor.
- Erwina, W., & Badrudin, R. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Gini Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderating Di Indones. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 31(2), 109–120.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Febrianti, F. (2021). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fitriani, N. L. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(1), 211–227.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>

- Indramawan, D. (2018). the Impacts of Financial Performance of Local. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 23.
- Khairudin, K., Tarmizi, R., Indrayenti, I., & ... (2019). Kinerja Keuangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. *Asian Journal of ...*, 4(3), 194–112.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw.
- KPBU. (2022). *Value For Money (VFM)*. Kementerian Keuangan. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm#:~:text=Value for Money merupakan sebuah, suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.>
- Litvack, J. I., & Seddon, J. (2002). Decentralization Briefing Notes: Strengthening Operational Skills in Community Driven Development. In *World Bank Institute Working Paper*.
- Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 118–138. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Nirwana, E., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2014). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS. *SOROT*. <https://doi.org/10.31258/sorot.9.1.2329>
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2023). *Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Kota Pekanbaru Tahun 2022*.
- Prakoso, L. I. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung*. Universitas Lampung.
- Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(1993), 185–199.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sari, F. N. G., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...*, 3(3), 129–140.
- Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Berty, I., & Zenita, R. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 56–65.
- Siregar, H. A. (2018). Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money dalam Konteks New Public Management dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau. *Bilancia*, 2(1), 85–94.
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(4), 277–286.
- Siswati, E., & Hermawati, D. T. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 93–114. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018531>
- Sugiantari, A. P., & Budiantara, I. N. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Jawa Timur menggunakan regresi semiparametrik spline. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(1), 37–41. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i1.3132>
- Sunarti, E. (2012). Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB*.
- Suryaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2015). Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(8), 537–554.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Toselong, R., Hapid, H., & Antong, A. (2011). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.47>
- Ulum, M. I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Bumi Aksara.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>